

**APLIKASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN  
MODAL KERJA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI PT.BPR SYARIAH  
AMPEK ANGKEK CANDUNG BUKITTINGGI DITINJAU MENURUT  
EKONOMI ISLAM**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)**



**LISA FEBRINA SARI  
NIM . 10825002744**

**PROGRAM SI  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1434 H / 2013 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang karena pengamatan penulis tentang keterbatasan modal yang dimiliki oleh pengusaha menengah kebawah dalam membeli barang-barang guna menunjang usaha. Semakin berkembang zaman maka semakin canggih pula mesin-mesin yang digunakan sebagai penunjang usaha demi mendapatkan keuntungan yang optimal. Oleh karena itu banyak pemilik usaha yang mengusahakan agar ada lembaga yang bisa menalangi pembelian mesin penunjang usaha tersebut, namun para calon nasabah terkendala mengenai persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh pihak perbankan yang meliputi legalitas diri, legalitas usaha ataupun legalitas jaminan yang diberikan.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (Field Research), dengan fokus penelitian di PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung yang berjumlah 30 orang pada tahun 2012 ditambah dengan Nasabah aktif terhitung bulan januari 2012 sebanyak 26 nasabah. Sedangkan untuk sampel penulis hanya mengambil 50% dari total populasi,15 orang untuk karyawan menggunakan metode *purposive sampling* dan 13 nasabah menggunakan metode *random sampling*. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembiayaan *murabahah* sebagai upaya pemenuhan modal kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung, apa kendala-kendala dalam aplikasi pembiayaan *murabahah* sebagai upaya pemenuhan modal kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap aplikasi pembiayaan *murabahah* sebagai upaya pemenuhan modal kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara, angket, dokumentasi, dan studi pustaka sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu setelah semua data terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan

sistematis sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas dalam kesimpulan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada dasarnya PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung dalam pembiayaan murabahah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan yang melingkupi legalitas diri nasabah, legalitas usaha dan legalitas jaminan yang harus disediakan. Adanya jaminan dalam pembiayaan ini juga tidak menyalahi syariat dikarenakan tujuan dari pihak BPR Syariah adalah agar nasabah merasa punya kewajiban untuk membayar atau melunasi pembiayaan yang disepakati. Menurut tinjauan ekonomi Islam dalam pelaksanaannya praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik. Kendala-kendala yang ada seperti masalah pelayanan, masalah keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan amanah yang ada pada pembiayaan tersebut hendaknya diselesaikan menurut prinsip Islam. Dalam Islam dianjurkan untuk mempermudah urusan sesama muslim yang mengalami kesulitan dengan mencari jalan keluar yang baik seperti memberi penangguhan pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan, agar terciptanya prinsip tolong menolong didalam Islam.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat beserta salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau nanti. Amiin

Skripsi ini berjudul **“APLIKASI MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN MODAL KERJA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI PT.BPR SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda Nelson Satria, Ibunda Elni, Kakanda Jerry Satria, Adinda Mega Amelya dan Adinda Irvanda Satria yang telah senantiasa memberikan do'a dan motivasi baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor dan Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau.

3. Bapak Dekan dan Bapak/Ibuk Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Mawardi,S.Ag.M.Si dan Darmawan Tia Indrajaya,M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Bapak Khairul Amri,MA selaku Pembimbing Skripsi sehingga berkat bimbingan beliau skripsi ini bisa selesai dengan baik.
6. Bapak Iswandi,SE selaku Direktur PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung
7. Seluruh karyawan/karyawati PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.
8. Bapak Syamsurizal SE.M.Sc.Ak selaku Pembimbing Akademis penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
10. Seluruh keluarga, orang-orang terdekat, sahabat, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Atas semua yang telah diberikan berupa bantuan moril dan materiil maka penulis mengucapkan kata “*Maaf dan Terima Kasih*” yang sebesar-besarnya, hanya do’a yang dapat penulis ucapkan semoga semua kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT.

Amiin Ya Rabbal ‘Alamin

Pekanbaru, 08 Februari 2013

**LISA FEBRINA SARI**

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	15
B. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	16
C. Struktur Organisasi PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	18
D. Produk dan Service PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	22

### BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembiayaan.....	27
B. Tujuan Pembiayaan.....	28
C. Pembiayaan yang berlaku pada Bank-Bank Syariah.....	29
D. Pembiayaan Murabahah	
1. Pengertian Murabahah.....	33
2. Landasan Syariah Murabahah.....	34
3. Rukun Murabahah.....	36
4. Manfaat dan Resiko Murabahah.....	37

5. Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah.....	38
6. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan.....	39

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

A. Aplikasi Pembiayaan Murabahah sebagai upaya pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	48
1. Kriteria-kriteria Usaha kecil Menengah (UKM) yang dapat menerima pembiayaan murabahah pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	45
2. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam pembelian mesin-mesin pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	48
B. Kendala-kendala dalam Aplikasi Pembiayaan Murabahah sebagai upaya pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	68
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Murabahah sebagai upaya pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.....	74

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususnya usaha kecil dan menengah telah mencapai perkembangan yang cukup pesat. UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia, UKM memiliki peran penting dan strategis dalam laju perekonomian masyarakat. UKM atau disebut dengan Usaha Kecil Menengah merupakan cara yang paling efektif dalam mendalami ilmu entrepreneur secara maksimal, karena berhadapan langsung dengan aplikasinya. Berbagai macam UKM bergerak dibidang masing-masing, seperti pangan, jasa, atau berupa barang-barang souvenir. UKM-UKM tersebut diharapkan nantinya dapat menjadi besar sehingga mampu bersaing dalam bisnis internasional.

Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya terus mengembangkan sekaligus memberdayakan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan antara lain dalam bentuk pembinaan dan pelatihan manajemen UKM ( Usaha Kecil dan Menengah) dan Koperasi.

Dalam seminar “Selamat Pagi Walikota” di ruang kerja Walikota, Balaikota, Gulai Bancah, Selasa Pagi (27/09/2011). Kabid Perindustrian Tati Yasmarni. Menurut Tati, sesuai dengan misi Koperindag yaitu mewujudkan



Koperasi dan UKM yang tangguh dan mandiri sebagai sokoguru perekonomian daerah dan menumbuh kembangkan industri berbasis klaster, industri berbasis one village one product (OVOP) / satu kampung dengan satu jenis produksi. Pihaknya akan terus mengembangkan perindustrian dan perdagangan yang lebih baik dan lebih tangguh yang menjadikan UKM sebagai penggerak perekonomian masyarakat Bukittinggi.<sup>1</sup> Namun yang menjadi kendala dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah tersebut adalah keterbatasan modal usaha, sehingga para pengusaha membutuhkan pinjaman dana dari lembaga-lembaga keuangan yang ada.

Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu fixed capital (modal tetap) dan circulating capital (modal yang bersirkulasi). Fixed capital contohnya seperti gedung-gedung, mesin, mobil, dan lain-lain, yaitu benda yang manfaatnya dinikmati, eksistensi substansinya tidak berkurang. Adapun circulating capital itu antara lain seperti bahan baku dan uang, yaitu benda yang ketika manfaatnya dinikmati, maka substansinya juga hilang.<sup>2</sup>

Perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia kini telah mendapatkan payung hukum tertinggi yang akan melindungi kiprah dan sepak terjang industri perbankan syariah di tanah air. Hal ini dengan diloloskannya Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi

---

<sup>1</sup> [www.bukittinggikota.go.id](http://www.bukittinggikota.go.id). Pemko Berdayakan UKM.28 September 2011

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2007), h.253.

undang-undang yakni Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008.<sup>3</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>4</sup> BPR Syariah adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam sistem perbankan nasional, BPR Syariah terfokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan.

Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPR Syariah memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPR Syariah. Selain itu, BPR Syariah juga bisa melakukan praktik pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah.

Salah satu akad yang digunakan BPR Syariah dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah *murabahah*. Pada *murabahah*,

---

<sup>3</sup> M. Umer Chapra, Tariqullah Khan., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (alih bahasa Ikhwan Abidin Basri), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. v.

<sup>4</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah 2008. Bab I Ketentuan Umum. h.3.

penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.<sup>5</sup>

Bai' Al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan.

BPR Syariah Ampek Angkek Candung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di kota Bukittinggi yang telah berdiri dari tahun 1999 yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR Syariah Ampek Angkek Candung ini melayani sektor mikro (Usaha Kecil Menengah), sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BPR Syariah Ampek Angkek Candung menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli.

---

<sup>5</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h.88.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Nasabah Pembiayaan**  
**PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi**  
**Tahun 2007-2011**

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Jumlah Rekening</b>	1.064	1.403	1.726	2.113	2.128
<b>Nominal</b>	9.812.831	15.278.379	19.692.278	25.868.716	33.405.425

(Dokumen BPR Syariah Ampek Angkek 2012)

Dalam menyalurkan circulating capital (modal yang bersirkulasi) khususnya modal usaha berupa uang maka lebih banyak menggunakan akad kerjasama berupa pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk pembelian mesin-mesin penunjang usaha dimana penilaiannya barang tersebut hanya dapat digunakan manfaatnya saja dan tidak habis maka menggunakan akad murabahah. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.<sup>6</sup>

Masyarakat mempunyai modal Sumber Daya Alam (SDA) seperti sawah, perkebunan dan juga bangunan / tempat usaha tapi yang menjadi kendala bagi usaha-usaha mereka tersebut adalah mesin-mesin penunjang usaha. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki. Semakin berkembangnya zaman maka semakin canggih pula mesin-mesin yang digunakan sebagai penunjang usaha demi mendapatkan keuntungan yang

---

<sup>6</sup> Iswandi, SE, (Direktur PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), Wawancara. Parit Putus. 17 April 2012.

optimal. Mesin-mesin canggih yang digunakan harganya pun mahal. Oleh karena itu banyak pemilik usaha kecil yang mengusahakan agar ada lembaga yang bisa menalangi pembelian mesin penunjang usaha tersebut.<sup>7</sup> Namun untuk bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan, ada persyaratan yang harus disediakan oleh calon nasabah yaitu barang yang jaminan yang ditetapkan oleh pihak perbankan, hal ini lah yang dirasa menyulitkan nasabah dalam mengakses pembiayaan yang ada di perbankan.

BPR Syariah Ampek Angkek Candung memberikan pembiayaan untuk pembelian mesin-mesin pendukung aktivitas perekonomian usaha kecil menengah seperti mesin pengilingan padi, mesin pengilingan tebu, traktor, mesin jahit, mesin bordir pakaian, compresor semuanya memakai akad pembiayaan murabahah dengan ketentuan yang berlaku pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung.

Iswandi.SE selaku Direktur PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi mengatakan bahwa :<sup>8</sup>

“Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Bukittinggi dan mempunyai visi menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.Maka BPR Syariah Ampek Angkek mendukung sekali usaha kecil yang produktif. Aplikasi akad pembiayaan murabahah pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi menurut penggunaanya terdiri dari dua hal yaitu pembiayaan murabahah untuk kebutuhan konsumtif dan pembiayaan murabahah untuk kebutuhan produktif. Untuk pembiayaan konsumtif maka pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah, sedangkan pembiayaan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

---

<sup>7</sup> M.Ridwan,(Nasabah pembiayaan Modal Kerja BPR Syariah Ampek Angkek), Wawancara.Usaha Pengilingan Padi Berkah Tilatang Kamang.19 Juni 2012.

<sup>8</sup>Iswandi.SE,(Direktur PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), Wawancara. Parit Putus.31 Maret dan 9 April 2012.

peningkatan usaha (modal), baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang akad pembiayaan khususnya *murabahah* dalam upaya pemenuhan modal usaha kecil menengah (UKM), dimana akad jual beli tersebut merupakan akad yang paling banyak digunakan untuk sektor produktif pada lembaga keuangan syariah saat ini khususnya pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.”**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam hal ini penulis akan membatasi permasalahan mengenai bagaimana aplikasi pembiayaan *murabahah* khususnya yang bersifat produktif dalam pembelian barang-barang penunjang usaha sebagai upaya pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.”

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian :

1. Bagaimana Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi?
2. Apa kendala-kendala dalam Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi?

### D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui Bagaimana aplikasi Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi.
2. Mengetahui Apa kendala-kendala dalam Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi.

3. Mengetahui Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi perbankan syariah dan tambahan khasanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah khususnya BPR Syariah Ampek Angkek Candung.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung yang terletak di Jln. Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 3,5.Bukittinggi–Sumatera Barat Telpon: 0752 – 31649.Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi ini adalah

- a. BPR Syariah Ampek Angkek Candung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di kota Bukittinggi.



- b. Dapat terjangkau serta memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Karyawan pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi, sedangkan objek penelitian adalah bagaimana aplikasi pembiayaan Murabahah sebagai upaya pemenuhan modal Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya dalam pembiayaan pembelian mesin-mesin usaha yang diterapkan disana.

## 3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi semenjak tahun 2011 sampai tahun 2012 yang berjumlah 30 orang karyawan ditambah dengan 26 nasabah yang masih aktif menggunakan pembiayaan murabahah yang khusus untuk pembelian mesin-mesin terhitung mulai bulan januari 2012.<sup>9</sup> Sedangkan untuk sampelnya penulis hanya mengambil 50% dari populasi yang ada yaitu sebanyak 15 orang karyawan yang kompeten mengenai masalah yang akan diteliti dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan 13 orang nasabah dengan menggunakan metode *random sampling*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Iswandi.SE,(Direktur PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), *Wawancara*. Parit Putus. 9 April 2012.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 218

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan angket secara langsung dengan karyawan yang berkompeten tentang aplikasi murabahah dan nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian mesin-mesin usaha pada PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku baik berupa bahan-bahan bacaan (library research) dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Observasi**, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang masalah atau kegiatan yang akan diteliti.
- b. **Wawancara**, yaitu dengan jalan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian atau dilakukan dengan cara interview dengan karyawan untuk mengetahui kebijakan dan mekanisme pembiayaan murabahah khususnya yang berhubungan dengan pembelian mesin-mesin penunjang usaha.
- c. **Angket**, yaitu menyebarkan angket yang berisikan pertanyaan yang tertulis mengenai permasalahan yang akan diteliti dan diajukan kepada responden penelitian.

- d. **Dokumentasi**, yaitu dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Ampek Angkek Candung.
- e. **Studi Pustaka**, yaitu penulis juga mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan situasi, kondisi, penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat maupun literatur yang ada.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskripsi yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta:Erlangga, 2010) hal. 139.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

- BAB I    Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II    Gambaran lokasi penelitian yang meliputi Sejarah berdirinya BPR Syariah Ampek Angkek Candung, Visi dan Misi BPR Syariah Ampek Angkek Candung, Struktur organisasi BPR Syariah Ampek Angkek Candung, Produk Perbankan BPR Syariah Ampek Angkek Candung
- BAB III    Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian pembiayaan, Pengertian murabahah, Landasan hukum maupun landasan syariah tentang murabahah, Rukun pembiayaan murabahah, Syarat-syarat murabahah, Manfaat dan Resiko murabahah, Teknis murabahah dalam perbankan.
- BAB IV    Hasil penelitian yang membahas tentang Bagaimana aplikasi Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi, Apa kendala-kendala dalam Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah

Ampek Angkek Candung Bukittinggi, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi.

BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya BPR Syariah Ampek Angkek Candung

Kehadiran BPR Syariah Ampek Angkek Candung sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis.<sup>1</sup>

Diawali dengan tujuan untuk mengurangi ruang gerak para rentenir yang ada di daerah Kecamatan Ampek Angkek dan Candung, maka para perantau masyarakat Ampek Angkek Candung Jakarta dan Bandung bertekad untuk mendirikan satu BPR sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Berkat kerja keras dari para pendiri sejak tahun 1996, akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan **Surat Izin Usaha dengan No. SK 32/57/KE/Dir tanggal 14 Mei 1999** sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan dana PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H. Sofyan, SH No. 1 tanggal 2 Februari 1998.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung 2012

<sup>2</sup> [http://bprsaac.comxa.com/1\\_4\\_Company-Profile.html](http://bprsaac.comxa.com/1_4_Company-Profile.html)

Menyusul pengakuan legal tersebut, PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 12 Juli 1999, BPR Syariah ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan dunia bisnis dengan nilai-nilai sosial dan rohani dalam menjalankan operasionalnya.

Posisi Desember 2008, BPR Syariah Ampek Angkek Candung berhasil mencatat total Asset sebesar Rp. 19 milyar serta memiliki 1 kantor kas dan 1 kantor cabang di Payakumbuh serta didukung oleh 31 karyawan termasuk Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. BPR Syariah Ampek Angkek Candung terus berikrar untuk semakin mengukuhkan diri dalam dunia perbankan serta mewujudkan visinya sebagai BPR yang Amanah dan Profesional.<sup>3</sup>

## **B. Visi dan Misi**

Dengan didasari cinta terhadap kampung halaman yang kuat dari para pendiri untuk berjihad di bidang ekonomi Islam disertai ridho dari Allah SWT. Syukur Alhamdulillah pada tanggal 12 Juli 1999 dilakukan grand opening yang diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat. Pendirian & operasional PT. BPR Syari'ah Ampek Angkek Candung tidak hanya berbasis bisnis saja, tetapi membawa visi dan misi yang mulia,<sup>4</sup>yaitu :

### **1. Visi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung**

Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>3</sup> Dokumen PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.2009

<sup>4</sup> Iswandi SE,(Direktur PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi), *Wawancara*. Parit Putus.18 Oktober 2012

## 2. Misi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung

Memberikan pelayanan yang islami dan profesional dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta menjadikan PT. BPRS Ampek Angkek Candung sebagai BPR Syari'ah terbaik di Indonesia.

Dalam menjalankan amanah ummat yaitu mengelola dana titipan ummat PT. BPRS Ampek Angkek Candung senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki yaitu :<sup>5</sup>

### a. Keadilan

Bertindak adil terhadap nasabah, baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

### b. Kemitraan

Bank memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan

### c. Transparan

Nasabah dapat mengetahui laporan keuangan Bank yang ditampilkan sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan, sehingga secara langsung dapat mengetahui dan menilai kondisi keuangan dan kualitas manajemen Bank.

---

<sup>5</sup> Dokumen PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.2011



#### d. Universal

Pelayanan jasa Perbankan Syariah yang ditawarkan diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status kehidupan, suku maupun golongan.

### C. Struktur Organisasi<sup>6</sup>

Pengorganisasian atau perencanaan dan pengembangan organisasi adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yg dicapai.<sup>7</sup>

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari setiap jabatan yang ada pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung<sup>8</sup> adalah sebagai berikut :

#### 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS ini bertugas menetapkan pembagian dividen yang diperoleh dalam satu priode, meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan kepada direksi dalam satu priode, serta mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi.

---

<sup>6</sup> Rina, (Costumer Service PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), *Wawancara*. Parit Putus. 18 Oktober 2012

<sup>7</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006). Cet-4. hal.104

<sup>8</sup> *Job Description*, PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 2012

2. Dewan Pengawas Syariah<sup>9</sup>

Dewan Pengawas Syariah ini bertugas sebagai pengawas segala kegiatan dan produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat apakah produk tersebut sistemnya sesuai syariah atau tidak.

3. Komisaris

Komisaris bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran yang telah dibuat dan disetujui dalam RUPS, serta memberi persetujuan serta penolakan atas permohonan diluar dari batas dan wewenang Direksi

4. Direktur Utama

Merupakan pimpinan yang mengatur pekerjaan dari karyawan dan berwenang memberhentikan dan menetapkan karyawan.

5. Direktur

Pemimpin dari kantor kas yang tugasnya sebagai penentu dari kegiatan karyawan.

6. Bagian Umum

Bertanggung jawab atas peraturan-peraturan dan pelaksanaan pekerjaan demi kelancaran operasional bank.

7. Accounting (pembukuan)

Mengarahkan, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasi (pembukuan), serta memberikan laporan berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

---

<sup>9</sup> Ibid. *Job Description*

8. Kasir / Teller

Melakukan kegiatan penerimaan dan mengeluarkan uang tunai dari atau kepada nasabah maupun pihak lain, mengatur, menyusun dan menyimpan uang, melaporkan persediaan dan kondisi fisik kas kepada manager operasional serta melakukan input transaksi kas atau pencatatan lainnya.

9. Account Officer

Melaksanakan pemasaran (penyaluran dan penghimpunan dana), menjaga kondisi pembiayaan tetap pada kondisi lancar dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

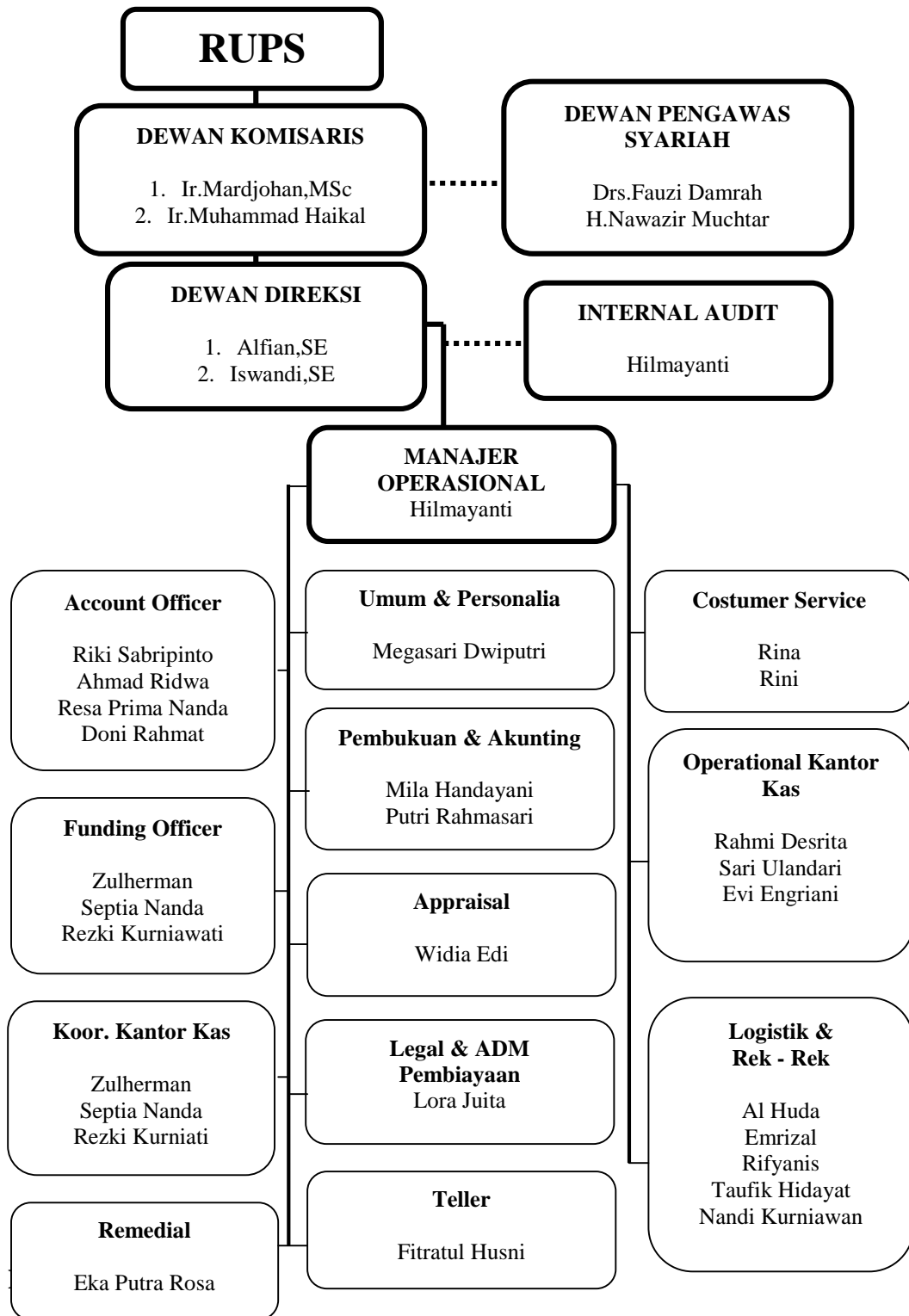
10. Administrasi Pembiayaan dan Legal

Melakukan peninjauan jaminan kelapangan bersama atau tanpa Account Officer , dalam rangka pengecekan data-data jaminan pembiayaan nasabah terhadap kondisi yang sebenarnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Job Description*, PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 2012

**STRUKTUR ORGANISASI PT.BPR SYARIAH AMPEK ANGKEK  
CANDUNG BUKITTINGGI TAHUN 2012<sup>11</sup>**



<sup>11</sup> Dokumen PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.2012

## **D. PRODUK – PRODUK BANK**

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

### **a. Penghimpunan Dana :**

#### **1. Tabungan Syariah**

Merupakan simpanan yang setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja dibuka di Kantor BPR Syariah Ampek Angkek Candung.

#### **2. Tabungan Pelajar**

Merupakan produk tabungan pendidikan yang dikhususkan untuk para pelajar yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun (tengah semester dan akhir semester) atau sesuai dengan kesepakatan bank dengan nasabah

#### **3. Tabungan Qurban**

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk hari raya *idul adha*, yang setorannya dapat dilakukan menjelang hari *idul adha* atau sesuai dengan kesepakatan bank dengan nasabah.

#### **4. Tabungan Lebaran**

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk hari raya *idul fitri*, yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya

---

<sup>12</sup>Dokumen PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.2012

hanya dapat dilakukan menjelang hari raya *idul fitri* atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.

#### 5. Tabungan Haji dan Umroh

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk ibadah haji atau umroh yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dilakukan saat menjelang ibadah haji dan umroh. Pada saat pendaftaran haji kami limpahkan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah

#### 6. Deposito

Merupakan simpanan yang bertujuan untuk berinvestasi dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara bank dan nasabah.

### **b. Penyaluran Dana**

Menurut jenis penggunaannya PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung menyediakan 2 pembiayaan sebagai berikut :<sup>13</sup>

#### a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam periode masa usaha, seperti pembelian barang dagang, alat-alat pertanian dan mesin-mesin industri.

---

<sup>13</sup>Rina, (Costumer Service PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), Wawancara. Parit Putus. 18 Oktober 2012

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan konsumsi pribadi, seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah dan lain-lain.

BPR Syariah Ampek Angkek Candung memberikan penyaluran dana pada usaha-usaha produktif, dimana semua pembiayaan yang diberikan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah yang memberlakukan sistem bagi hasil. Adapun jenis penyaluran (pembiayaan) yang ada pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah sebagai berikut :

1. Murabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah margin (keuntungan) yang disepakati. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati.

Pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung pembiayaan murabahah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.<sup>14</sup>

a. Pembiayaan langsung

Pembiayaan yang dilakukan dimana bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan pengajuan permohonan dipenuhi dan dilengkapi

---

<sup>14</sup> Rina, (Costumer Service PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), *Wawancara*. Parit Putus. 18 Oktober 2012

oleh nasabah dan pada saat itu dilakukan akad perjanjian kerjasamanya.

b. Pembiayaan tidak langsung

Pembiayaan yang dilakukan dimana Bank terlebih dahulu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

2. Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang jelas dan usaha yang dijalani tidak bertentangan dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam, adapun pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil sesuai ke sepakatan yang disepakati.

3. Qard (Pinjaman Kebajikan)

BPR Syariah Ampek Angkek Candung menyediakan fasilitas kredit kebajikan yang dananya bersumber dari simpanan amanah. Pembiayaan ini diperuntukan bagi penerima zakat (*mustahiq*) agar taraf hidup mereka bisa lebih baik dan harapan besar nasabah yang menerima pembiayaan ini untuk masa ke depannya bisa berubah status menjadi wajib zakat (*muzaqi*). Pembiayaan Qard ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial tanpa keuntungan.

4. Ijarah

BPR Syariah menyediakan fasilitas sewa menyewa, dimana BPRS membeli aset yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian



menyewakannya kepada nasabah. Dengan cara ini bank dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga dapat mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhi kebutuhan investasinya yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui BPR Syariah Ampek Angkek Candung memiliki berbagai produk dan jasa-jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah demi mewujudkan visinya yaitu Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>15</sup> *ibid*

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.<sup>1</sup>

Pengertian pembiayaan dari beberapa sumber :

1. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan dana untuk menggunakan dana yang telah dihimpun oleh Lembaga Keuangan tersebut dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyimpannya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>2</sup>
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). hal. 4.

<sup>2</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'a Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) .hal. 60.

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Pembiayaan dalam arti luas merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.<sup>4</sup>

## **B. Tujuan Pembiayaan**

Pemberian pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak terlepas dari visi dan misi bank yang menyediakan pembiayaan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah :<sup>5</sup>

1. *Profitability* (keuntungan), yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bukan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Press, 2001). Cet-4, hal.7

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta : (UPP)AMP YKPN), Cet-1, hal.206

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management : Teori , Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), Cet.1, hal.5-6.

2. *Safety* (keamanan), keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability (keuntungan) dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

### C. Pembiayaan yang berlaku pada bank-bank yang berbasis syariah

Secara umum berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah, yaitu :

#### 1. Prinsip Bagi-Hasil (*Profil Sharing*)

Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu:<sup>6</sup>

##### a) *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

##### b) *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>7</sup> Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung

---

<sup>6</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syari'a Dari Teory ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001) .hal.90.

<sup>7</sup> *Ibid*,hal.95

oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

c) *Al-Muzaro'ah*

*Al-Muzaro'ah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dan hasil panen.<sup>8</sup>

d) *Al-Musaqoh*

*Al-Musaqoh* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>9</sup>

## 2. Prinsip Jual Beli (*sale and purchase*)

Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah:

a) *Bai al-murabahah*

*Bai al-murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.

---

<sup>8</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syaria' Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001) .hal.99.

<sup>9</sup> *Ibid*,hal.10

Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>10</sup>

*b) Bai as-salam*

*Bai as-salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.<sup>11</sup>

*c) Bai Al-istishna*

*Bai Al-istishna* ialah jual beli barang yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

### **3. Prinsip Sewa (*Operational Lease And Financial Lease*)**

Prinsip sewa yang diterapkan dibank syariah adalah *al-ijarah*. *Al-ijarah* merupakan perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

*Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan kombinasi dari jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad. Perpindahan hak milik

---

<sup>10</sup> Adiwarman.A.Karim.”*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010).Cet-7.hal.97.

<sup>11</sup> *Ibid*,hal.102

obyek sewa kepada penyewa dalam ijarah mintahiya bittamlik dapat dilakukan dengan :<sup>12</sup>

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan.
- c. Penjualan pada masa akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal.
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga yang disepakati dalam akad.

#### 4. Prinsip Jasa (*Fee-Based Servises*)

##### a. *Al-wakalah*

*Al-Wakalah* ialah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapatkan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalannya.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang

##### b. *Al-kafalah*

*Al-Kafalah* adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfuul anhu* atau *ashil*).

---

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal.126

c. *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.<sup>13</sup>

#### D. Pembiayaan Murabahah

##### 1) Pengertian murabahah

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* ( ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Jadi pengertian murabahah secara bahasa adalah saling menguntungkan.<sup>14</sup> Keuntungan pihak pertama (pembeli) adalah dapat terpenuhinya kebutuhan dan keuntungan pihak kedua (penjual) adalah tambahan harga pokok (selisih harga pokok) yang didapat berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama.

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya mengartikan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>15</sup> Dalam hal ini, penjual harus memberitahukan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, dan menentukan lama pembiayaan, serta menentukan besarnya angsuran yang akan diangsur.

---

<sup>13</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teory ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001) .hal.128

<sup>14</sup> A.W.Munawwir,*Kamus Al-Munawir*,(Surabaya:Pustaka Progresif,1997),hal.498.

<sup>15</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teory ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001) .hal.101.



Murabahah juga bisa diartikan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>16</sup>

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).<sup>17</sup>

## 2) Landasan Syariah

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>18</sup>

Dengan demikian jual beli merupakan suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.<sup>19</sup>

Adapun mengenai hukum jual beli *murabahah*, asalnya dibolehkan. Dalil akan hal ini adalah keumuman firman Allah yang menjelaskan halalnya jual beli diantaranya :

---

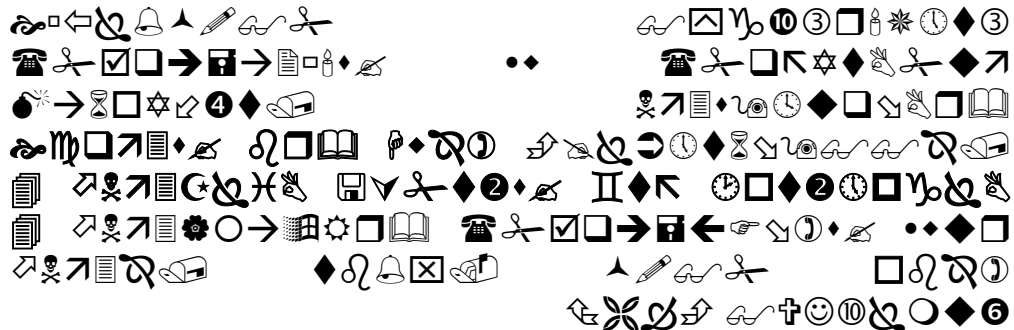
<sup>16</sup> Andri. Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2010). Cet-2. hal. 79.

<sup>17</sup> Adiwarman. A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Cet-7. hal. 115.

<sup>18</sup> Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 128.

<sup>19</sup> Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 58.

## a) Al-Qur an



Artinya : “...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

batil kecuali dengan **perniagaan yang berlaku dengan suka sama**

**suka diantara kamu.” (An Nisa :29).<sup>20</sup>**

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan janganlah termasuk orang-orang yang tamak yang memakan harta orang lain tanpa ganti mata uang atau sesuatu yang bermanfaat. Tetapi makanlah harta itu dengan perniagaan yang pokok penghalalannya ialah saling meridhai. Dasar perniagaan itu adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual.<sup>21</sup> Murabahah termasuk jual beli yang saling ridho di antara penjual dan pembeli, sehingga termasuk jual beli yang dibolehkan. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Ibid.hal,65

<sup>21</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemah Tafsir Al-Maragi 5*. (Semarang: Toha Putra, 1993). Cet-2. hal.27.

<sup>22</sup> *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2006). hal.828.

b) **Hadist – Hadist**

مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدْحًا  
وَجِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ

Artinya : Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW pernah menjual wadah minuman (gelas) dan pelana kuda kepada orang yang mau menambah harganya.<sup>23</sup>

3) **Rukun Murabahah (jual beli)**

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi dalah ijab dan qabul yang menunjukkan ada pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan,<sup>24</sup> yang menunjukkan keridhaan, dengan adanya pertukaran dua harta yang menjadi hak milik baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Adapun Rukun Murabahah menurut Ascarya :<sup>25</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan)
- c. Harga (tsaman)
- d. *Ijab* dan *Qabul* (shighah)

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadist yang disepakati Empat Imam* : Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 216.

<sup>24</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) Cet Ke1, hal. 16.

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 82.

Sedangkan syarat-syarat pokok pembiayaan murabahah menurut Usmani (1999) antara lain :<sup>26</sup>

- i. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan
- ii. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk *lump sum* atau persentase tertentu dari biaya.
- iii. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukan kedalam perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga *agregat*.
- iv. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang / komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan *prinsip murabahah*.

#### **4) Manfaat dan Resiko Murabahah**

Menurut Antonio secara perbankan yang prinsipnya jual beli (*murabahah*) juga mempunyai manfaat dan resiko yang harus kita ketahui, diantaranya adalah :

---

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hal. 82.

**a. Manfaat Bai' al-Murabahah<sup>27</sup>**

Adapun kelebihan kotrak murabahah (pembayaran yang ditunda) adalah sebagai berikut :

1. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark up) yang diartikan sebagai prosentase harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya.
2. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas.
3. Subyek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
4. Subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
5. Pembayaran yang ditunda.

**b. Resiko<sup>28</sup>**

1. Kelalaian Atau *defult*, yakni nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi Harga komperatif, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya nasabah, maka bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual beli tersebut.

---

<sup>27</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, alih bahasa oleh Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), Cet I, hal. 139.

<sup>28</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teory ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) .hal. 107.

3. Penolakan Nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai alasan. Bisa jadi karena barangnya rusak dalam perjalanan sehingga bank mengalami resiko, oleh karena itu bank mencari pihak lain untuk menjual.
4. Dijual, karena bai al-murabahah bersifat milik nasabah. Nasabah bebas melakukan kembali. Jika terjadi demikian, resiko default akan besar.

#### **5) FATWA DSN MUI No. 04/ DSN - MUI /IV /2000 Tentang MURABAHAH**

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/ DSNMUI/ IV/ 2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah<sup>29</sup> yaitu sebagai berikut :

*Pertama* : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

---

<sup>29</sup> <http://www.mui.or.id>. fatwa-dsn-mui-no-04dsnmuiv2000 – tentang -murabahah&catid=57:fatwa-dsn-mui. Jumat, 26 Maret 2010 14:25

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:<sup>30</sup>

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

---

<sup>30</sup> *ibid*

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka<sup>31</sup>
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

---

<sup>31</sup> *ibid*



*Ketiga* : Jaminan dalam Murabahah:<sup>32</sup>

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat* : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima* : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

---

<sup>32</sup> *ibid*

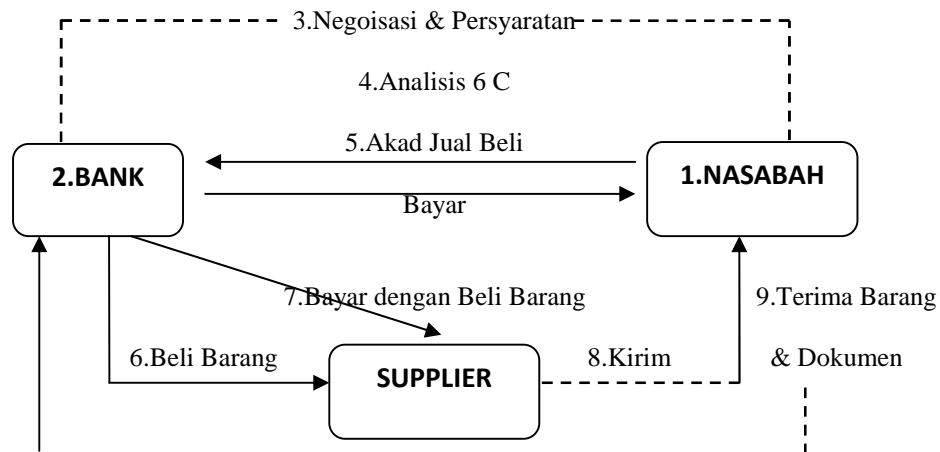
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam* : Bangkrut dalam Murabahah.<sup>33</sup>

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

## 6) Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah

Secara umum aplikasi perbankan dari murabahah dapat dilihat dari Skema Bai Al-Murabahah<sup>34</sup>



Sumber Muhammad Syafi i Antonio

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'a Dari Teory ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001) .hal.107.

Penjelasan:

Nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan untuk membeli barang, kemudian oleh pihak bank nasabah dimintai persyaratan yang ada, seperti: Pengajuan berkas-berkas seperti KTP, sertifikat, BPKB, surat KK dan surat nikah. Kemudian proses yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara menganalisis dengan analisis 6C (*character, capacity, capytal, collateral, condition of economic dan constrain*).

Kemudian setelah bank melakukan analisis 6C dan merasa data-data yang diberikan oleh nasabah sudah memenuhi persyaratan pembiayaan, maka pihak bank membeli barang dan pihak bank juga membayar uangnya ke *suplayer*. Setelah melaksanakan analisis 6C dan dinyatakan layak untuk mengajukan pembiayaan kemudian dilaksanakan akad jual beli dan bank membeli barang secara tunai ke *suplayer*. Setelah barang dipesan *suplayer* mengirim barang ke nasabah dan dokumennya diserahkan ke bank.

Dalam pembiayaan murabahah ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan uangnya dikemudian hari secara tunai maupun secara kredit (tangguh).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008), hal. 83.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi**

#### **1. Kriteria-kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dapat menerima pembiayaan murabahah pada PT.BPR syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi**

BPR Syariah Ampek Angkek Candung menetapkan kriteria-kriteria nasabah yang dapat menerima pembiayaan. Pemberian pembiayaan kepada nasabah bukanlah merupakan hal yang mudah, hal ini dikarenakan adanya pembiayaan tersebut sangat terkait dengan masalah kepercayaan, baik kepercayaan Bank kepada nasabah yang akan menerima pembiayaan maupun kepercayaan nasabah terhadap bank tempat mereka melakukan peminjaman dana.<sup>1</sup> Kriteria usaha yang dapat dikatakan layak menerima pembiayaan adalah :

##### **a. Usaha Kecil Menengah yang memenuhi aspek syariah dan yuridis.**

Aspek Syariah dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah haruslah usaha yang memiliki prinsip Halal dan Toyyiban jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, tidak mengandung unsur penipuan dan barang-

---

<sup>1</sup>Ahmad Ridwan (Account Officer).Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung,15 September 2012

barang haram. Sedangkan Aspek Yuridis yaitu usaha yang dijalani harus jelas secara hukum.<sup>2</sup>

**b. Usaha Kecil Menengah yang mempunyai latar belakang usaha yang jelas.**

Penilaian latar belakang usaha yang akan dibiayai, maka PT BPR syariah Ampek Angkek Candung menggunakan analisis 5 C yang terdiri dari:

1. Character (Karakter)
2. Capacity (Kemampuan)
3. Capital (Modal)
4. Kondisi of Economic (Kondisi Ekonomi)
5. Colateral (Jaminan)

Adapun untuk penjelasan analisis 5C kredit adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

**a. Character**

adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

**b. Capacity<sup>4</sup>**

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya

---

<sup>2</sup> Widia Edi (Appraisal). Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 15 September 2012

<sup>3</sup> Dokumen, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 2012

<sup>4</sup> Ibid. *dokumen*

mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

### **c. Capital**

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

### **d. Condition of Economic**

Adalah bagaimana keadaan ekonomi politik sekarang ini dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha yang dijalankan. Jadi pada saat kondisi yang baik maka akan sedikit kemungkinan terjadinya kredit macet.

### **e. Collateral**

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Sehingga terjadi suatu masalah, maka jaminan tersebut di pergunakan untuk melunasi hutang tersebut sesuai dengan jumlah yang di pinjamkan.

Selain adanya penilaian menggunakan prinsip 5C, unsur yang paling utama pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah prinsip kepercayaan.<sup>5</sup> Istilah kredit macet atau kredit bermasalah pun sering kita dengar didunia perbankan, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Semua itu disebabkan oleh kurang telitinya dan kurang transparannya antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pemberian pembiayaan

---

<sup>5</sup> Megasari Dwiputri (Bagian Umum & Personalia), Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 18 Oktober 2012

murabahah kepada usaha kecil menengah yang ada dikota Bukittinggi, pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung sangat berhati-hati.

## 2. Aplikasi Pembiayaan Murabahah pada BPR syariah Ampek Angkek Candung

BPR Syariah Ampek Angkek Candung melayani sektor mikro (Usaha Kecil Menengah), sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BPR Syariah Ampek Angkek Candung menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli.<sup>6</sup>

Sebelum membahas bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan mikro pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi berdasarkan angket yang telah penulis berikan maka dapat dilihat alasan responden dalam memilih PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung sebagai Mitra Usaha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Alasan Responden memilih PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung sebagai Mitra Usaha**

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Hanya coba-coba	1	7,69%
2	Sesuai prinsip Syariah	5	38,47%
3	Margin yang ditawarkan cukup ringan	4	30,77 %
4	Pelayanan yang profesional	3	23,07 %
	Jumlah	13	100%

Sumber : Data Olahan 2012

---

<sup>6</sup> Dokumen.PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung,2012

Berdasarkan data diatas dapat dilihat alasan responden dalam memilih PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung sebagai mitra usaha, 1 responden atau 7,69% memilih karena ingin coba-coba semata, 5 responden atau 38,47% memilih dengan alasan PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung sesuai dengan prinsip syariah, 4 responden atau 30,77% memilih dengan alasan Margin yang ditawarkan PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung cukup ringan dan sisanya 3 responden atau 23,07% memberi alasan karena pelayanan yang profesional yg diberikan oleh PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Jadi dapat dianalisa bahwa sesuai dengan visi BPR Syariah Ampek Angkek Candung yaitu menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka pembiayaan murabahah yang ada pada PT.BPR syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi dibagi atas dua jenis yaitu pembiayaan murabahah yang bersifat konsumtif dan pembiayaan murabahah yang bersifat produktif: <sup>7</sup>

1. Pembiayaan murabahah yang bersifat konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti renovasi rumah, dll.

---

<sup>7</sup> Iswandi (Direktur), Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 18 Oktober 2012



## 2. Pembiayaan murabahah yang bersifat produktif

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, seperti perdagangan dan perusahaan.

Dalam hal pembiayaan, PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung menyediakan pembiayaan untuk nasabah yang ingin melakukan pembelian barang modal kerja untuk investasi. Adapun pembiayaan yang ditawarkan PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung kepada nasabah bertujuan untuk pembelian barang-barang modal kerja yang dapat meningkatkan usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut,<sup>8</sup> Seperti:

- a. Usaha Pertanian: Pembiayaannya antara lain adalah untuk peralatan pengolahan tanah, seperti pembibitan, pembelian alat-alat pertanian, pembelian alat penyemprotan hama, dan pembelian alat bajak sawah.
- b. Usaha Perindustrian: Pembiayaan yang dapat diberikan untuk pembelian alat-alat industri dan perbaikan tempat usaha, seperti alat-alat tekstil berupa mesin jahit, mesin bordir, mesin sablon,dll.
- c. Usaha Perdagangan: Pembiayaan yang diberikan untuk alat penjualan, perbaikan dan perluasan usaha. Seperti pembelian mesin fotocopy, mesin cetak foto, mesin penggilingan tebu, dan mesin-mesin pembuatan makanan dan minuman seperti mesin untuk membuat popcorn, mesin giling tebu,dll.

---

<sup>8</sup> Rini (Costumer Service).Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung,20 September 2012

- d. Usaha Jasa: Pembiayaannya adalah untuk pembelian kendaraan bermotor untuk sarana usaha jasa.

Dalam pembiayaan pembelian barang-barang penunjang kerja, berbeda dengan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, hal tersebut menyangkut jaminan yang diberikan. Dalam pembelian kendaraan bermotor, adanya surat khusus kepemilikan kendaraan tersebut berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan bermotor) bisa langsung dijadikan jaminan. BPKB tersebut akan diserahkan kepada pemilik kendaraan apabila pemilik tersebut telah melunasi segala kewajibannya pada pihak BPRS.<sup>9</sup>

Pembelian barang-barang penunjang usaha tidak ada surat kepemilikan khusus atas barang-barang yang dibeli layaknya kendaraan yang ada kriteria khusus seperti nomor kendaraan dan nomor mesin, oleh karena itu apabila seseorang ingin melakukan transaksi pembelian barang-barang penunjang usaha maka harus menjaminkan salah satu barang jaminan yang diperbolehkan oleh pihak BPRS,<sup>10</sup> seperti Sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor dengan syarat STNK kendaraan bermotor yang dijaminkan harus bernomor polisi wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Klos Kartu Kuning, Emas Perhiasan, Deposito. Adapun jaminan yang diserahkan pada BPRS harus dilengkapi dengan foto jaminan tersebut.

---

<sup>9</sup> Lora Juita, (Legal Dan Administrasi Pembiayaan). Wawancara. BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 18 Oktober 2012

<sup>10</sup> Brosur, PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 2012

Pada dasarnya, jaminan bukanlah merupakan rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam bai' *al-murabahah*.<sup>11</sup> Jaminan merupakan tambahan yang diberikan nasabah untuk kepastian dalam pembayaran dikarenakan ada prinsip kehati-hatian yang diterapkan. Pada BPR syariah walaupun biasanya pihak bank memberikan besarnya jumlah pembiayaan lebih kecil dari nilai jaminan yang diberikan, namun tidak jarang diberikan jumlah pembiayaan yang sama ataupun lebih besar dari nilai jaminan yang diberikan, hal ini disebabkan karena faktor yang terpenting dari pembiayaan tersebut adalah kepercayaan.<sup>12</sup>

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah maka BPR Syariah Ampek Angkek Candung memberikan pelayanan terhadap nasabahnya berupa pembiayaan murabahah, yang mana sampai saat ini adanya pembiayaan murabahah tersebut memberikan kontribusi bagi BPR Syariah Ampek Angkek dan juga sesuai prinsipnya dapat membantu nasabah, agar terhindar dari jual beli barang-barang haram ataupun jual beli yang dilarang oleh syariat Islam.

Adapun jangka waktu yang diberikan oleh pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, dan untuk kendaraan maksimal 3 tahun. Tingkat margin yang diberikan oleh pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah 15% - 18 %.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) .hal.105.

<sup>12</sup> Widia Edi (Appraisal), Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 18 Oktober 2012

<sup>13</sup> Rina (Costumer Service), Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 15 September 2012

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi ini adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Mempunyai Usaha yang jelas dan halal untuk dibiayai
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan dan melampirkan foto copy ktp 5 lembar (suami istri) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga, Pas Photo 2 lembar (suami istri) dan foto copy Jaminan (BPKB + STNK).
3. Melampirkan surat keterangan berdomisili dan usaha dari desa / kelurahan domisili pemohon.
4. Memiliki Jaminan berupa : Sertifikat Tanah, BPKB dan STNK Mobil atau Motor atas nama pemohon dengan Plat no Sumbar, Klos Kartu Kuning, Emas Perhiasan, Deposito yang dilengkapi dengan foto jaminan tersebut.
5. Tidak sedang mendapat pinjaman dari Bank lain, Koperasi dan Julo-julo.
6. Umur minimal 21 Tahun maksimal 60 Tahun.
7. Jaminan tidak bisa dipinjam, kecuali ada penukaran jaminan sementara dan untuk BPKB dengan fotocopy STNK.
8. Barang / Benda yang dibeli dari pembiayaan BPRS AAC langsung menjadi jaminan.
9. Jaminan yang bukan milik pemohon, pemilik jaminan harus datang ke kantor dan ikut menandatangani Akad dan Surat Kuasa dan atau ada kwitansi pembelian kendaraan terakhir yang tercantum di BPKB.

---

<sup>14</sup> Form Prosedur Pengajuan Pembiayaan BPR Syariah Ampek Angkek Candung

10. Setiap nasabah pembiayaan diwajibkan membuka tabungan pinjaman (Tampin).
11. Biaya adm 1% sampai dengan 2% dari plafond tergantung jangka waktu pembiayaan. Biaya Provisi, Materai dan asuransi jiwa maupun kendaraan yang dibayar tunai.
12. Penandatanganan Akad :
  - a. Untuk pemohon yang sudah berkeluarga, ditanda tangani berdua (Suami / Istri).
  - b. Untuk pemohon yang belum berkeluarga, penandatanganan Akad bersama dengan salah satu orang tua.
13. Karena akad pembiayaannya murabahah (Jual Beli), maka kwitansi / Faktur pembelian barang yang dibiayai oleh BPRS AAC diserahkan paling lambat 1 bulan setelah pencairan / realisasi pembiayaan.<sup>15</sup>

Seperti yang diketahui bersama bahwa pembiayaan yang diajukan nasabah kepada BPR tidak dapat langsung dicairkan begitu saja, maksudnya setiap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah harus melalui tahap-tahap atau proses yang telah ditetapkan oleh BPR dan dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan pembiayaan. Adapun prosedur pembiayaan pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Nasabah datang ke BPR syariah untuk berkonsultasi dan mendapatkan penjelasan tentang produk yang akan digunakan. Hal ini penting dilakukan agar calon nasabah mengerti tentang produk dan aplikasi pembiayaan yang

---

<sup>15</sup> Brosur PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi Tahun 2012

<sup>16</sup> Hilmayanti (Manager Operational). Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 20 September 2012

akan digunakan. Tidak hanya itu pihak BPR Syariah juga akan menjelaskan perbedaan antara sistem bagi hasil (keuntungan) yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah dengan sistem bunga yang ada pada Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Sebagai bukti permohonan pembiayaan, nasabah harus mengisi formulir Aplikasi Permohonan Pengajuan Pembiayaan yang disediakan oleh Costumer Service BPR, menandatangani dan melengkapi semua persyaratan administratif yang harus dilampirkan. Pada saat inilah, selain mendapatkan informasi tentang pembiayaan murabahah, calon nasabah juga diberitahu mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain : berapa besarnya uang tunai sebagai angsuran pendahuluan yang harus disediakan, berapa besarnya margin keuntungan yang akan diambil oleh pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung, jumlah angsuran tiap bulan dan lamanya masa angsuran. Pada tahap ini calon nasabah belum ada ikatan apa-apa dengan pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Calon nasabah masih bebas menentukan pilihan menerima atau mengajukan tawaran atas harga jual yang diajukan oleh pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Apabila calon nasabah mengajukan penawaran terhadap berbagai hal yang telah ditentukan oleh pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung, maka pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung akan mempertimbangkan lebih lanjut. Tahap ini sebenarnya adalah tahapan tawar menawar antara calon nasabah dengan pihak BPR

Syariah Ampek Angkek Candung, sebelum kedua belah pihak tersebut mengikat diri dalam suatu akad.

3. Setelah semua kelengkapan persyaratan dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan, maka pihak BPR Syariah akan melakukan analisis terhadap data yang ada, dimulai dari legalitas diri pemohon pembiayaan, legalitas surat-surat yang dibutuhkan dan keberadaan jaminan dan lokasi usaha dari calon nasabah dengan menggunakan analisis yang ditetapkan oleh PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.<sup>17</sup> BPRS juga melakukan BI checking pada setiap calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, hal ini bertujuan untuk melihat apakah calon nasabah tersebut ada atau tidak melakukan pembiayaan dengan lembaga keuangan lainnya. BI checking tersebut dapat dijadikan bahan penilaian apakah seorang calon nasabah layak atau tidak diberi pembiayaan.
4. Dengan ditandatanganinya form aplikasi oleh calon nasabah, sebenarnya secara formal calon nasabah tersebut telah menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Ada beberapa hal yang harus dilakukan nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan murabahah,<sup>18</sup> diantaranya :
  - a. Calon nasabah harus membuka rekening di BPR yang bersangkutan.
  - b. Calon nasabah harus melunasi biaya-biaya untuk pencairan (administrasi, asuransi dan notaris).

---

<sup>17</sup> Lora Juita (Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan), *Wawancara*, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 18 Oktober 2012

<sup>18</sup> Resa Prima Nanda (Account Officer). *Wawancara*, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 20 September 2012

- c. Adanya barang yang dijaminkan, dan ada wewenang BPR Syariah Ampek Angkek Candung untuk melakukan sita jaminan apabila terjadi wanprestasi oleh calon nasabah tersebut. Jaminan dalam islam sebenarnya bukanlah merupakan hal yang wajib ada. Namun aplikasi perbankan menetapkan adanya jaminan dikarenakan adanya prinsip kehati-hatian , dan agar nasabah tidak lupa atau pun lalai dengan kewajibannya.<sup>19</sup>

Jaminan pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung khususnya pada pembiayaan pembelian mesin-mesin penunjang usaha disesuaikan dengan banyaknya pembiayaan yang diterima nasabah. Walaupun jaminan yang diperbolehkan oleh BPRS disediakan, tapi pihak bank tidak lah langsung menerimanya, namun sebelum menerima jaminan tersebut pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung melakukan *survey* terlebih dahulu atas apa yang dijaminkan, apakah masih layak dijadikan jaminan atau tidak.

- d. Setelah semua persyaratan dirasa cukup selanjutnya menandatangani akad murabahah, sebagai tanda persetujuan terhadap surat tersebut, calon nasabah harus menandatangani bersama dengan isteri / suaminya apabila sudah menikah, atau salah seorang dari orang tua apabila belum menikah.

Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) atau surat penawaran (Offering Letter) itu sebenarnya sudah merupakan akad

---

<sup>19</sup> Doni Rahmat (Account Officer). *Wawancara*, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 20 Oktober 2012



dibawah tangan antara calon nasabah BPR Syariah Ampek Angkek Candung, karena pada dasarnya antara calon nasabah dengan pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung sudah tercapai kesepakatan meliputi semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang dibuktikan dengan tandatanganinya surat tersebut oleh calon nasabah. Hanya saja merupakan akta otentik karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>20</sup>

5. Setelah dipenuhinya semua persyaratan yang tercantum dalam SP3 / offering letter tersebut, termasuk nasabah telah menyetorkan sejumlah dana yang terdiri dari uang muka / urbun, biaya administrasi, biaya notaris, biaya materai dan biaya asuransi, kemudian pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung dan calon nasabah membuat dan menandatangani akad didepan notaris yang ditunjukan oleh pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung, meliputi :<sup>21</sup>

- a. Akad Pembiayaan Murabahah
- b. Surat Kuasa Memotong Tabungan
- c. Tanda Terima Penerimaan / Pengambilan Jaminan
- d. Akad Transaksi Wakalah, dikarenakan pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung memberikan kuasa / perwakilan (Wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu kepada calon

---

<sup>20</sup> Widia Edi (Appraisal).Wawancara, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 20 Oktober 2012

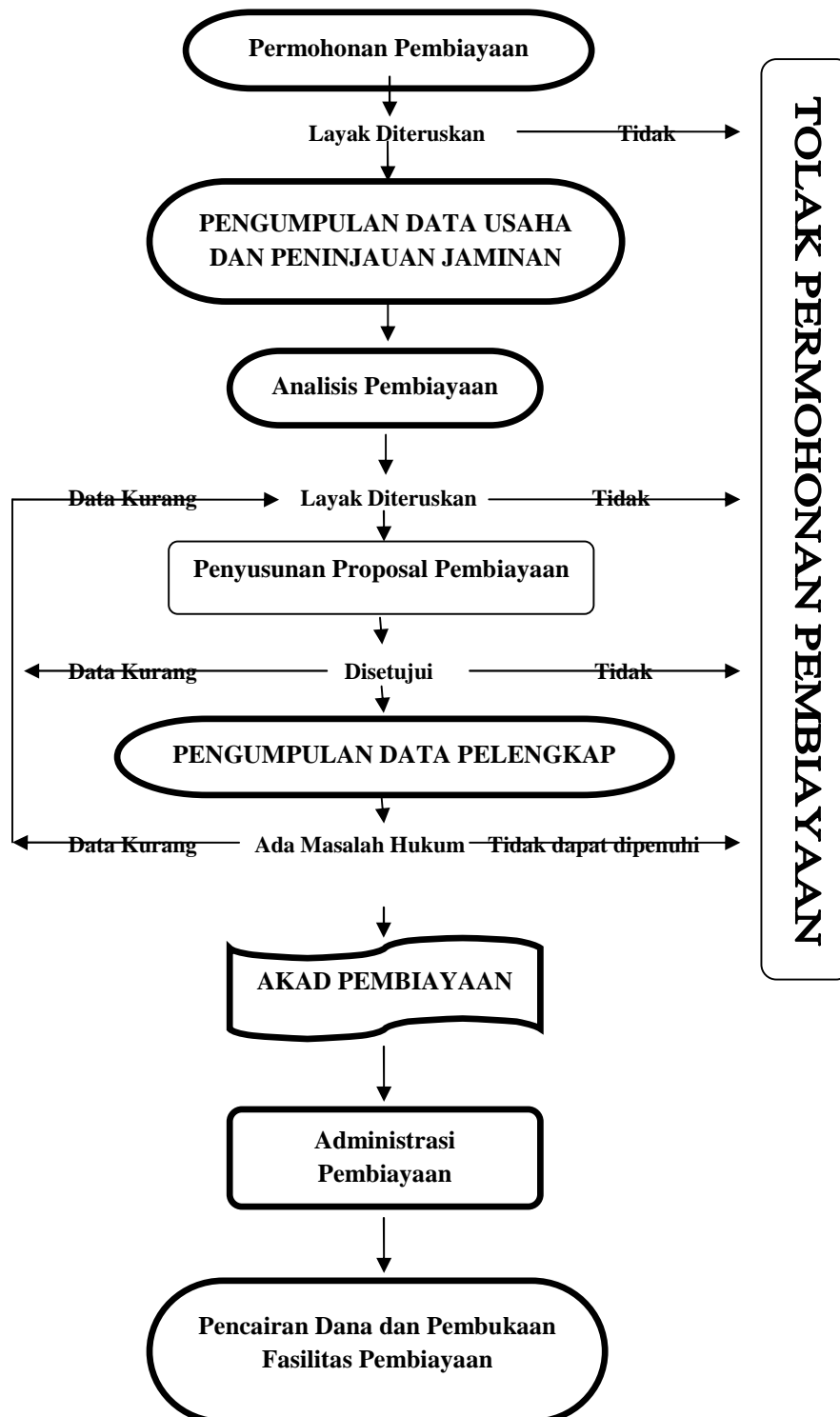
<sup>21</sup> Lora Juita (Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan),Wawancara,BPR Syariah Ampek Angkek Candung,18 Oktober 2012

nasabah untuk membeli barang yang telah disepakati dalam akad murabahah.

e. Surat Kuasa Menjual / Memindahkan Hak Atas Jaminan.

6. Tahap selanjutnya yaitu penyerahan obyek murabahah dari pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung kepada nasabah. Dalam prakteknya penyerahan barang kepada nasabah dilakukan oleh pihak supplier. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung yang kemudian mengharuskan adanya perwakilan. Namun bukti transaksi berupa kwitansi pembelian harus diserahkan nasabah kepada pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Barang yang diserahkan kepada nasabah harus dipastikan benar-benar dalam keadaan baik atau tidak rusak.
7. Setelah barang diterima oleh pihak nasabah, selanjutnya adalah kewajiban nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung untuk mengangsur pembayaran secara berkala selama jangka waktu pelunasan yang telah disepakati didalam akad.

## ALUR PROSES PEMBIAYAAN<sup>22</sup>



Sumber : Dokumen BPR Syariah Ampek Angkek September 2012

<sup>22</sup> Dokumen 2012.PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung

Pembiayaan murabahah yang bersifat produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi nasabah dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, seperti perdagangan dan perusahaan. Dalam hal ini adanya penambahan akad yaitu akad *wakalah* yaitu mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertindak atas nama orang memberi perwakilan.

Dari hasil survey yang penulis lakukan dalam bentuk angket terhadap nasabah tentang prosedur pembiayaan murabahah untuk pembelian mesin-mesin sebagai upaya peningkatan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tanggapan responden terhadap Persyaratan Aplikasi**  
**Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang-barang pada**  
**PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung**

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Sulit	0	0%
2	Cukup Sulit	6	46,15%
3	Tidak Sulit	7	53,85 %
	Jumlah	13	100%

Sumber : *Data Olahan 2012*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada responden atau 0% menyatakan prosedur aplikasi pembiayaan murabahah untuk pembelian barang-barang pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung sangat sulit, 6 responden atau 46,15% mengatakan cukup sulit dan sisanya menjawab tidak sulit.

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis nasabah yang menyatakan aplikasi pembiayaan murabahah cukup sulit dikarenakan keterbatasan surat-surat ataupun jaminan yang akan diberikan calon nasabah untuk melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan proposal pembiayaan.<sup>23</sup>

Seluruh sistem operasional yang ada pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi tidak terlepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana salah satu tugasnya terlibat dalam hal penentu keputusan investasi, dengan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah menggambarkan konsistensi syariah yang mempunyai prinsip ta'awun yakni kerjasama tolong menolong yang berpijak pada nilai-nilai syariah.

Pembiayaan murabahah yang digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah dengan tujuan produktif sebagai modal usaha-usaha yang dimiliki oleh nasabah. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam kasus jual beli pesanan, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, maka penjual akan mencari barang yang sesuai dengan spesifikasinya kemudian menjual kepada si pembeli (nasabah).

Pembiayaan murabahah yang digunakan oleh nasabah diharapkan dapat meningkatkan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Dalam hal ini tanggapan nasabah mengenai keadaan usahanya sebelum menggunakan pembiayaan modal kerja murabahah pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung dapat dilihat dari tabel berikut ini :

---

<sup>23</sup> Doni Eka Putra (Nasabah). *Wawancara*, 18 Oktober 2012

**Tabel 4.3**  
**Bagaimana Keadaan Usaha / Bisnis Anda Sebelum Menggunakan**  
**Pembiayaan Murabahah Dari BPR Syariah Ampek Angkek Candung**

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Baik	4	30,77%
2	Cukup Baik	7	53,85%
3	Tidak Baik (Kurang Berkembang)	2	15,38%
	Jumlah	13	100%

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari 13 sampel, 4 responden (30,77%) mengakui bahwa usaha atau bisnis yang mereka jalani sebelum menggunakan pembiayaan modal kerja murabahah baik, kemudian 7 responden (53,85%) mengakui bahwa usaha atau bisnis yang mereka jalani sebelum menggunakan pembiayaan modal kerja murabahah cukup baik, sedangkan 2 responden (15,38%) mengakui bahwa usaha atau bisnis yang mereka jalani sebelum menggunakan pembiayaan modal kerja murabahah kurang berkembang atau kurang baik. Maka dapat dianalisa bahwa nasabah yang ingin menggunakan pembiayaan murabahah ini adalah mereka yang ingin mengembangkan usaha yang mereka jalani agar bisa menjadi lebih baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, nasabah mengatakan usaha yang mereka jalani sebelum menerima pembiayaan dari BPR Syariah Ampek Angkek Candung cukup baik, hanya saja nasabah merasa usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapat tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Reni Yulnita (Pemilik Usaha Konveksi Anugrah). *Wawancara* .Pincuran, 25 2 November 2012.

**Tabel 4.4**  
**Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan Murabahah Yang**  
**Diberikan Oleh PT.BPR Syariah Ampek Angkek Khususnya Pembelian**  
**Barang - Barang Penunjang Usaha**

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat membantu	10	76,92%
2	Cukup membantu	2	15,38%
3	Biasa saja (tidak ada pengaruh dalam usaha)	1	7,69%
	Jumlah	13	100%

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari 13 sampel,10 responden (75,92%) mengakui bahwa pembiayaan murabahah khususnya pembelian barang-barang penunjang usaha dari PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung sangat membantu,kemudian 2 responden (15,38%) mengakui bahwa pembiayaan murabahah khususnya pembelian barang penunjang usaha cukup membantu usaha yang mereka jalani, sedangkan 1 responden (7,69%) mengakui pembiayaan murabahah khususnya pembelian mesin-mesin penunjang usaha biasa saja (tidak mempengaruhi usaha yang nasabah jalani).

Dengan demikian dapat dianalisa bahwa pembiayaan murabahah khususnya pembelian mesin-mesin penunjang usaha sangat membantu dalam pengembangan usaha yang dijalani nasabah, hal ini dapat terlihat dari angket yang disebar 13 responden yang ada 10 responden (75,92) atau lebih dari 50% mengakui bahwa keberadaan pembiayaan yang diberikan sangat membantu usaha yang dijalani nasabah.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap nasabah, adanya pembiayaan murabahah dalam pembelian mesin - mesin ini sangat

membantu dikarenakan nasabah yang semula tidak memiliki kemampuan dana untuk membeli mesin yang diinginkan secara tunai, dengan adanya produk bank ini jadi bisa memiliki mesin tersebut yang digunakan untuk aktivitas usaha yang dijalani nasabah.<sup>25</sup>

Oleh karena itu dengan adanya pembiayaan murabahah diharapkan dapat membuat usaha yang dijalani oleh nasabah lebih baik daripada sebelumnya. Berikut ini tanggapan nasabah mengenai perkembangan bisnis atau usaha yang telah dijalani setelah mendapat bantuan pembiayaan dari pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung.

**Tabel 4.5**  
**Bagaimana keadaan Usaha / Bisnis Anda setelah menggunakan pembiayaan murabahah yang diberikan BPR Syariah Ampek Angkek Candung**

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Baik	11	84,62%
2	Cukup Baik	2	15,38%
3	Tidak Baik (Kurang Berkembang)	0	0%
	Jumlah	13	100%

Sumber : *Data Olahan 2012*

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari 13 sampel,11 responden (84,62%) mengakui bahwa usaha atau bisnis yang mereka jalani setelah menggunakan pembiayaan murabahah sangat baik,kemudian 2 responden (15,38%) mengakui bahwa usaha atau bisnis yang mereka jalani setelah menggunakan pembiayaan modal kerja murabahah cukup baik,dan 0 responden mengakui bahwa usaha atau bisnis yang mereka jalani setelah menggunakan pembiayaan modal kerja murabahah cukup baik.

---

<sup>25</sup> Yendra Yenris,(Nasabah PT BPRS Ampek Angkek Candung),*Wawancara*,20 Oktober 2012



Dengan demikian keberadaan pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung memberi manfaat untuk meningkatkan usaha kecil menengah yang dijalani oleh nasabah. Adapun indikator-indikator yang menunjukkan meningkatnya usaha yang dijalani nasabah lebih baik daripada sebelumnya adalah :

1. Sebelumnya nasabah hanya berangan-angan untuk membeli suatu barang yang diinginkan dapat membantu meningkatkan usaha, karena keterbatasan kemampuan untuk membeli secara tunai, namun setelah menggunakan pembiayaan murabahah, keinginan nasabah dapat terkabul.<sup>26</sup>
2. Sebelum menerima pembiayaan usaha yang dijalani nasabah kurang begitu berkembang dan perputaran barang yang diproduksi lambat, hal ini dikarenakan terbatasnya dana dan mesin penunjang usaha, namun setelah adanya bantuan pembiayaan murabahah usaha nasabah menjadi lebih baik, adanya penambahan mesin pada usahanya menjadikan kerja lebih cepat selesai dan perputaran barang yang diproduksi cepat, sehingga keuntungan yang didapat pun bisa lebih maksimal.<sup>27</sup>

Ibu Rosma Dewi (30 Tahun) merupakan seorang wiraswasta, warga Pasar Banto yang sehari-harinya menjalani aktivitasnya pada usaha percetakan. Menurut pengakuannya usaha percetakan milik Ibu Dewi ini sebelumnya hanya memiliki 1 mesin sablon saja itu pun mesin lama, karena

---

<sup>26</sup> Mira (Pemilik Usaha Percetakan). *Wawancara*. Simpang Kapela Bukittinggi. 2 November 2012

<sup>27</sup> Yendra Yenis, (Nasabah PT BPRS Ampek Angkek Candung), *Wawancara*, 20 Oktober 2012

banyaknya permintaan pelanggan maka mengharuskan Ibu Dewi untuk menambah lagi mesin sablon agar kerja bisa lebih cepat dan keuntungan juga bisa lebih optimal. Ibu Dewi mendatangi BPR Syariah Ampek Angkek Candung untuk mengajukan permohonan pembiayaan disebabkan keterbatasan Ibu Dewi dalam membeli mesin sablon yang baru secara tunai. Harga mesin sablon paketan baru ditaksir seharga 14.500.000,-.<sup>28</sup> Maka penetapan harga jual pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah sebagai berikut :

Harga Mesin Sablon Paketan	: Rp 14.500.000,- (Plafond)
Jangka Waktu	: 24 bulan ( 2 Tahun)
Maka Perhitungan Pembiayaan Mesin Sablon :	
Margin Bank (Keuntungan)	: Margin x Jangka Waktu x Plafond BPRS
	: 18 % x 2 Tahun x 14.500.000,-
	: <b>Rp 5.220.000,-</b>
<b>Harga penjualan</b>	: <b>Harga Beli Barang + Margin</b>
	: <b>Rp 14.500.000,- + Rp 5.220.000,-</b>
	: <b>Rp 19.720.000,-</b>
Biaya Adm + Provisi	: Rp 611.400,-
Biaya Materai	: Rp 30.000,-
Biaya Asuransi	: Rp 230.750,-
Biaya Notaris	: Rp 150.000,-
	-----+
<b>Total Biaya</b>	: <b>Rp 1.022.150,- (Dibayar Tunai)</b>
<b>Angsuran Perbulan Ibu Dewi : <u>Plafond Bank + Margin</u></b>	
	<b>Jangka Waktu</b>
	: <b>Rp 14.500.000,- + Rp 5.220.000,-</b>
	<b>24 bulan</b>
	: <b>Rp 821.700,- per bulan</b>

Dengan adanya penambahan mesin sablon baru pada usaha Ibu Dewi, usaha yang dijalani bisa semakin berkembang dan lebih baik dari sebelumnya sehingga Ibu Dewi pun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih optimal,

---

<sup>28</sup> Rosma Dewi (Pemilik Usaha Percetakan). *Wawancara*. Pasar Banto. 12 Februari 2013

dimana keuntungan tersebut bisa dijadikan tambahan modal bagi usaha yang dijalani dan dapat digunakan sebagai tambahan untuk pembayaran angsuran pembiayaan mesin sablon pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung.<sup>29</sup>

**B. Kendala - Kendala Dalam Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi**

Dibalik adanya pembiayaan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah-nasabahnya, BPR Syariah Ampek Angkek Candung menghadapi beberapa kendala baik itu kendala internal BPR Syariah itu sendiri maupun kendala eksternal yang datang dari nasabah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kelemahan yang menjadi kendala internal dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung, adapun faktor yaitu :

**1. Kendala Internal**

**a. Kendala dalam pelayanan**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang utama dalam pelayanan. Pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Sumber Daya yang bertugas terlihat masih belum dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dapat dilihat sebagai contoh :

---

<sup>29</sup> Rosma Dewi (Pemilik Usaha Percetakan). *Wawancara*. Pasar Banto. 12 Februari 2013

Setiap menjelang akhir bulan dan diawal bulan, praktis pelayanan terhadap nasabah atau calon nasabah pemohon pembiayaan sangat minim dan harus menunggu lama, dan tidak jarang nasabah disuruh kembali lewat tanggal 10, dengan alasan :

- a. Petugas sedang tidak ditempat, sedang keluar menagih angsuran.<sup>30</sup>
- b. Petugas sedang sibuk menyiapkan laporan bulanan dan lain-lain<sup>31</sup>

Masalah yang terjadi menyangkut kemacetan pembiayaan pembayaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak nasabah juga dikarenakan beberapa faktor penyebab :<sup>32</sup>

- a. Adanya faktor kecerobohan dimana disaat menganalisa data nasabah, apa data yang diajukan oleh nasabah terkadang berbeda dengan keadaan nasabah yang sebenarnya.
- b. Keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan observasi menyeluruh terhadap setiap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan menyangkut legalitas diri, legalitas usaha maupun legalitas barang yang dijamin.

**b. Kendala dalam peninjauan kembali dana yang telah direalisasikan**

Kurangnya tinjauan atau survey kembali dari pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung terhadap pembiayaan yang telah disalurkan untuk perkembangan usaha nasabah dikarenakan keterbatasan waktu

---

<sup>30</sup> Emasri (Nasabah Pembiayaan Murabahah). *Wawancara*. BPRS AAC. 12 Februari 2013

<sup>31</sup> Yendra Yenis, (Nasabah PT BPRS Ampek Angkek Candung), *Wawancara*, 20 Oktober 2012

<sup>32</sup> Iswandi (Direktur), *Wawancara*, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 12 Februari 2013

dan tenaga, sehingga disaat terjadi kemacetan dalam pembayaran cicilan pihak BPR Syariah menemukan kasus yang sama, bahwa nasabah kurang berhasil dalam pengelolaan atau nasabah yang tidak menjalankan amanahnya sesuai kesepakatan awal akad artinya ada beberapa nasabah yang tidak menggunakan pembiayaan yang telah diberikan sesuai kebutuhannya diawal akad dan menggunakannya untuk keperluan lain sehingga prediksi atau analisa pihak bank disaat permohonan pembiayaan berbeda dengan realita yang terjadi setelah pencairan disetujui.<sup>33</sup>

## **2. Kendala eksternal**

### **a. Kendala nasabah dalam mengurus legalitas usaha maupun legalitas diri<sup>34</sup>**

Dalam memberikan pembiayaan murabahah tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah diantaranya kelengkapan surat-surat. Nasabah sering terkendala dalam hal melengkapi surat-surat perizinan usaha dan surat-surat legalitas diri. Pembiayaan usaha kecil tidak dipersyaratkan izin-izin usaha yang lengkap, cukup hanya dengan keterangan usaha dari instansi seperti surat keterangan domisili dari kelurahan dan lain- lain. Namun nasabah sering

---

<sup>33</sup> Riki Sabripinto (Account Officer). *Wawancara*, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 12 Februari 2012

<sup>34</sup> Lora Juita, (Legal Dan Administrasi Pembiayaan). *Wawancara*. BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 13 Februari 2013

bingung dan tak jarang putus asa dikarenakan syarat yang ditetapkan tersebut tidak dimilikinya.<sup>35</sup>

**b. Kendala nasabah dalam penyediaan jaminan<sup>36</sup>**

Mengenai jaminan, adanya persyaratan yang ditetapkan mengenai pembiayaan murabahah itu sendiri. Sebenarnya jaminan bukanlah merupakan suatu rukun atau syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam akad murabahah, namun dalam prakteknya jaminan dimasukan menjadi salah satu syarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar perikatan antara nasabah dan bank mengenai pembiayaan yang dilakukan dan tanggungjawab nasabah dalam pelunasan cicilan dapat berjalan lancar dan nasabah membayar cicilannya tepat waktu.

Adapun barang yang dapat dijaminkan untuk mendapat pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah barang yang dijadikan objek murabahah itu sendiri, namun dirasa perlu adanya jaminan tambahan dalam akad. BPR Syariah Ampek Angkek Candung menetapkan jaminan tambahan yang harus ditetapkan,<sup>37</sup> seperti:

**1. Sertifikat tanah**

---

<sup>35</sup> Afrizal (Nasabah Pembiayaan Murabahah). *Wawancara*. BPRS AAC. 12 Februari 2013

<sup>36</sup> Lora Juita, (Legal Dan Administrasi Pembiayaan). *Wawancara*. BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 13 Februari 2013

<sup>37</sup> Form Prosedur Pengajuan Pembiayaan BPR Syariah Ampek Angkek Candung

2. BPKB kendaraan bermotor dengan syarat STNK kendaraan bermotor yang dijaminkan harus bernomor polisi wilayah Sumatera Barat (Sumbar)
3. Klos Kartu Kuning
4. Emas Perhiasan
5. Deposito

Adanya jaminan tambahan yang ditetapkan menjadi kendala bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Banyak calon nasabah yang tidak memiliki barang yang bisa dijaminkan,<sup>38</sup> hal ini menyebabkan nasabah kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada.

**c. Kendala Keterlambatan dalam Pembayaran Cicilan**

Cedera janji pada nasabah terjadi apabila nasabah tersebut tidak melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran selama 3 bulan berturut-turut, dikarenakan berbagai alasan yang dilakukan oleh nasabah baik itu nasabah benar-benar mengalami kesulitan ekonomi maupun ada faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dalam hal ini bank memiliki hak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah, baik itu sebagian atau seluruh jumlah hutang nasabah kepada bank untuk dibayar secara dicicil maupun sekaligus. Apabila ada nasabah yang termasuk dalam kriteria cedera janji tersebut

---

<sup>38</sup> Risky (Nasabah Pembiayaan Murabahah). *Wawancara*. BPRS AAC. 12 Februari 2013

maka pihak bank akan segera melakukan tinjauan dan tindakan sebagai berikut :<sup>39</sup>

1) Apabila keterlambatan disebabkan karena kesulitan ekonomi yang terjadi pada nasabah maka pihak bank akan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan survey atau peninjauan kepada nasabah dengan cara mendatangi nasabah dan menanyakan apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran.
- b. Jika keterlambatan pembayaran nasabah dikarenakan nasabah ada keperluan mendadak atau keperluan yang tidak diduga sehingga nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar cicilan sampai masa jatuh tempo maka pihak bank akan memberi kebijakan untuk memperpanjang waktu pembayaran nasabah hingga akhir bulan masa pembayaran atau memperpanjang waktu pengembalian nasabah tersebut hal ini menyebabkan cicilan semakin kecil karena waktu pelunasannya diperpanjang.<sup>40</sup>
- c. Jika keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan adanya faktor kesengajaan, dimana pada kenyataannya nasabah memiliki dana ataupun kemampuan untuk

---

<sup>39</sup> Iswandi.SE,(Direktur PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), *Wawancara*. BPR Syariah Ampek Angkek Candung.13 Februari 2013.

<sup>40</sup> Doni Rahmat (Account Officer).*Wawancara*, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 13 Februari 2013



membayar cicilan sebelum masa jatuh tempo pembayaran tapi kenyataannya nasabah tidak melakukan pembayaran atau terlambat dalam membayar cicilan, maka disini bank harus mengadakan klarifikasi terhadap nasabah tersebut karena tindakan tersebut dirasa merugikan pihak bank yang menyebabkan kemacetan, adapun masalah penghukuman yang diberlakukan bank pada nasabah yang melakukan cedera janji harus dilihat per kasusnya, setiap kasus tidak bisa diberi tindakan yang sama. Pemberlakuan tindakan atau sanksi secara serta merta tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu kepada nasabah sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. Oleh karena itu pihak BPR Syariah harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan atau sanksi yang tepat diberikan kepada nasabah yang sengaja menangguhkan pembayaran cicilan pembiayaan.<sup>41</sup>

**C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi**

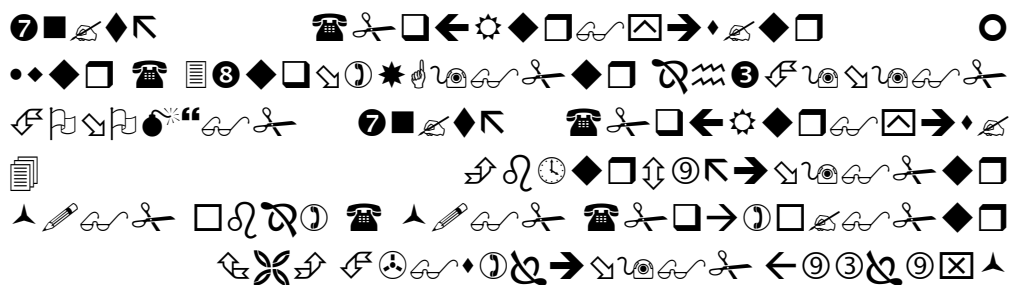
Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang

---

<sup>41</sup> *ibid*

memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>42</sup>

Pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Ampek Candung dibenarkan karena didalamnya terdapat prinsip tolong menolong sesama manusia, dalam rangka mempermudah dan meringankan masalah yang nasabah hadapi, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 2 :<sup>43</sup>



Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Al-Maidah ayat 2)

Pelayanan yang diberikan PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung dalam pembiayaan murabahah pada umumnya sudah baik, mulai dari pemberian informasi pembiayaan, pelayanan yang menyangkut keluhan nasabah pra permohonan, pembayaran cicilan dan pembayaran bermasalah dan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dikarenakan kendala-kendala lainnya. PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung hanya

<sup>42</sup> Andri.Soemitra,*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*.(Jakarta : Kencana,2010).Cet-2.hal.17.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemah*,(Bandung : CV.Diponegoro,2000), hal.85

perlu meningkatkan pelayanan yang ada agar semua aktivitas yang dilakukan antar pihak bank maupun nasabah dapat berjalan dengan lancar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ  
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي  
عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ،  
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا  
نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ  
فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

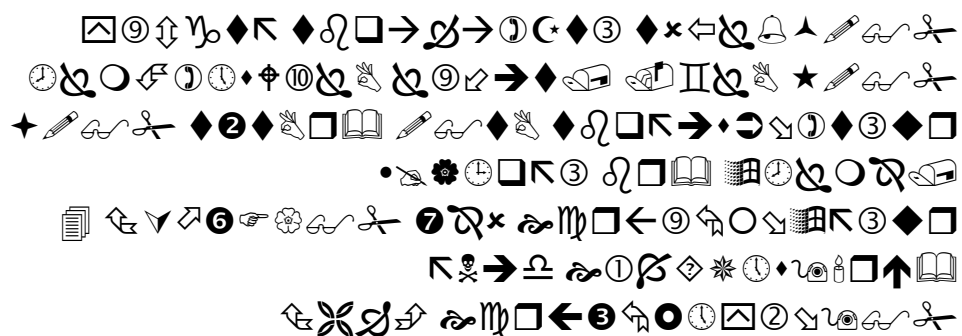
Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya. (HR. Muslim).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Abdullah Haidhir. *Hadits Arba'in Nawawiyah*. hadits ke 36. hal.103

Dalam pemberian pembiayaan, pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung sangat berhati-hati, pihak BPRS harus terlebih dahulu melakukan survey terhadap kebenaran data yang diberikan calon nasabah yang akan menjadi mitra pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung agar pembiayaan yang akan dilakukan tidak keluar dari syariat islam yang telah ditentukan . Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terdapat masalah bahwa ada nasabah yang tidak menggunakan dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan awal yang mereka buat dengan bank. Ada nasabah yang menunjukan i'tikad yang kurang baik dimana mereka tidak menjalankan amanah terhadap dana yang diperolehnya.

Landasan Islam mengenai nasabah yang ingkar janji terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 27 :<sup>45</sup>



Artinya : (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi. (QS.Al-Baqarah : 27)

PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung membuat kesepakatan dan menetapkan syarat-syarat dalam pembiayaan yang diberikan

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV.Diponegoro, 2000), hal.6

khususnya pembiayaan murabahah ada syarat-syarat yang ditetapkan pihak BPRS seperti surat permohonan tertulis, legalitas usaha, laporan keuangan dan syarat-syarat lainnya. Kesepakatan tersebut dibuat agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab yang telah di amanahkan.

Walaupun pada kenyataannya dalam penelitian ini penulis menemukan masih ada nasabah yang melanggar kesepakatan dalam penggunaan pembiayaan yang diberikan, nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak BPR Syariah. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip Islam karena apa yang telah dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.

Adapun contoh kasus yang peneliti temukan pada penelitian ini adalah ada salah seorang nasabah yang bernama Arif (Nama Samaran) mengajukan pembiayaan untuk pembelian sebuah mesin kompresor untuk menunjang usaha bengkel yang dijalaninya. Namun, setelah dana cair nasabah tersebut tidak membelikannya untuk mesin kompresor tapi membelikannya pada mesin-mesin lain yang harganya jauh lebih murah dari mesin kompresor.<sup>46</sup> Dengan demikian nasabah telah mengingkari akad yang telah disepakati diawal dengan pihak BPRS Ampek Angkek Candung.

---

<sup>46</sup> Doni Rahmat (Account Officer). *Wawancara*, BPR Syariah Ampek Angkek Candung, 20 Oktober 2012

Adapun landasan Islam tentang orang yang melanggar akad terdapat dalam surat Ash-Shaff ayat 2-3 :<sup>47</sup>



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?(2) Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (3).

Setelah melakukan penelitian ,menganalisa data dan memaparkan hasil penelitian maka dapat dilihat banyak pengusaha kecil yang sangat membutuhkan dana untuk pengembangan usaha yang mereka khususnya pengadaan barang penunjang usaha, apabila tidak mendapatkan bantuan pembiayaan maka usaha yang dijalani tidak berkembang atau mungkin usahanya bisa bangkrut dikarenakan keuntungan yang didapat kecil dan tidak maksimal. Oleh karena itu, PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi turut berpartisipasi untuk membantu pengusaha kecil dalam meningkatkan usahanya.

Akan tetapi setelah dana direalisasikan atau dana cair dan diserahkan oleh pihak BPR Syariah kepada nasabah, ada sebagian nasabah yang menyelewengkan dana tersebut, dengan kata lain pada awal akad

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV.Diponegoro, 2000), hal.440

dana yang dicairkan pihak BPR Syariah untuk membantu menunjang usaha nasabah, ternyata nasabah menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar akad awal tanpa sepengetahuan pihak BPR Syariah. Hal tersebut tentunya akan membuat rugi kedua belah pihak, dimana apa yang telah disepakati tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Pada dasarnya keberadaan BPR Syariah membantu masyarakat khususnya para pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usaha yang mereka jalani. Hanya saja ada sebagian kecil nasabah yang berlaku curang dan menyalahi kesepakatan yang telah disepakati di dalam akad.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan nasabah dalam pembayaran cicilan, dikarenakan faktor ekonomi nasabah yang memang kurang baik dan ada juga faktor kesenggajaan dimana sebagian kecil dari nasabah menunda-nunda pembayaran padahal pada kenyataannya mereka sudah memiliki kemampuan membayar cicilan tapi sering kali dipakai untuk keperluan lain. Dalam Islam ada ketentuan dalam pembayaran hutang, bagi nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan dana maka pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung hendaknya memberi kelapangan dengan cara awal memperpanjang waktu pembayaran menjadi sedikit lebih lama dari waktu yang disepakati, hal tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :<sup>48</sup>




---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV.Diponegoro, 2000), hal.37



Artinya :Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS.Al-Baqarah : 280)<sup>49</sup>

Bagi nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran cicilannya bagi nasabah yang sebenarnya telah mampu membayarnya tentu saja hal ini akan menyebabkan kerugian bagi pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung, dana yang seharusnya ada dan bisa disalurkan lagi untuk keperluan nasabah lain jadi terkendala dikarenakan faktor kesengajaan pihak-pihak terkait.

Membayar atau melunasi hutang adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang berhutang. Bahkan Islam mengajarkan bagi orang yang sudah mampu untuk melunasi hutang, agar sesegera mungkin hutangnya dilunasi. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk melunasi dikategorikan sebagai sebuah kedzaliman. Dalam hadits diterangkan:

[ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. ]

---

<sup>49</sup> Ibid.hal.37



Artinya: Rasulullah saw bersabda: Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman.” [HR. Al-Bukhari]<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Abu Dawud, kitab Al-Aqdhiyah, no. 3628 dan Ibnu Majah, bab Al-Habs fiddin wal Mulazamah, no. 2427

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung dalam pembiayaan murabahah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan yang melingkupi legalitas diri nasabah, legalitas usaha dan legalitas jaminan yang harus disediakan.
2. Ada beberapa kendala yang terjadi pada pembiayaan murabahah baik itu kendala internal yang disebabkan oleh pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung itu sendiri yaitu berupa pelayanan, maupun kendala eksternal yang datang dari nasabah pembiayaan murabahah menyangkut kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang ditetapkan, dan juga masalah yang lazim terjadi yaitu keterlambatan dalam pembayaran yang disebabkan dengan alasan yang berbeda.
3. Menurut tinjauan ekonomi Islam dalam pelaksanaannya praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik. Kendala-kendala yang ada seperti masalah pelayanan, masalah keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan amanah yang ada pada pembiayaan tersebut hendaknya diselesaikan menurut prinsip islam. Dalam islam dianjurkan untuk mempermudah urusan sesama muslim yang mengalami kesulitan

dengan mencari jalan keluar yang baik, memberi penangguhan pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan. Agar terciptanya prinsip tolong menolong didalam Islam.

## **B. Saran**

Setelah penulis berusaha memaparkan bagaimana aplikasi murabahah sebagai upaya pemenuhan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam pembelian mesin-mesin penunjang usaha diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah hendaknya BPR Syariah Ampek Angkek Candung haruslah lebih meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik,dan dapat menciptakan produk-produk perbankan yang baru yang lebih inovatif,sehingga dapat lebih mudah mewujudkan visinya “Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.”
2. Seharusnya dalam memberikan pembiayaan, pihak bank hendaknya menganalisa lebih detail setiap persyaratan yang diajukan, sehingga dapat memperkecil kesalahan yang nantinya dapat merugikan pihak bank dan setelah realisasi pencairan terjadi, pihak bank hendaknya rutin melakukan tinjauan ulang secara berkala ke lokasi atau tempat nasabah menjalankan usahanya.Dengan kunjungan yang secara rutin dilakukan maka pihak bank bisa mendeteksi gejala-gejala yang akan berdampak negatif atau kerugian pada usaha nasabah dan pihak bank sendiri.

3. Sebagai nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah, hendaknya dapat memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan baik sehingga usaha yang dijalani nasabah dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat meningkatkan taraf perekonomian nasabah itu sendiri. Sehingga pembayaran cicilan pun dapat dengan lancar dilakukan tanpa adanya keterlambatan dari tanggal yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemah Tafsir Al-Maragi 5*. Semarang: Toha Putra, 1993
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010. Cet. 2.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV, Pustaka Agung Harapan, 2002
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2007
- Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, [dsn\\_mui@mui-online.org](mailto:dsn_mui@mui-online.org) dan [dsnmui@gmail.com](mailto:dsnmui@gmail.com)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001
- Muhammad, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan I, Yogyakarta: TrustMedia, 2009
- M. Umer Chapra., Tariqullah Khan., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (alih bahasa Ikhwan Abidin Basri), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Undang-Undang *Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen*, Ed.1.Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.

[www.bukittinggikota.go.id](http://www.bukittinggikota.go.id). *Pemko Berdayakan UKM*. 28 September 2011

Zulkifli & Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi, Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim. 2003